



Pengaruh Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera

Tsaniya Hany Nadzwa Nuzul¹, Jumaiyah^{2*}

^{1,2} Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

* E-mail Korespondensi: mayawahidah@unisnu.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 27-01-2026

Revision: 03-02-2026

Published: 27-02-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1410

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menilai pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap kemiskinan. Analisis regresi data panel *Fixed Effect Model* digunakan terhadap 488 observasi dari 61 kabupaten di Pulau Sumatera tahun 2016-2023 yang dipilih secara *purposive sampling* dengan perangkat lunak E-views. Hasil menunjukkan DD, ADD, dan BHPR berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan secara parsial maupun simultan, mengindikasikan peningkatan ketiga instrumen transfer fiskal menurunkan tingkat kemiskinan karena desa dengan dana transfer besar memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk program pengentasan kemiskinan. Keterbatasan penelitian mencakup penggunaan data tingkat kabupaten yang belum menangkap variasi antar desa dan pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan. Penelitian ini memperkuat teori desentralisasi fiskal melalui integrasi komprehensif tiga instrumen transfer fiskal, serta memberikan bukti empiris sebagai dasar perumusan kebijakan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Kemiskinan, Desentralisasi Fiskal.

ABSTRACT

This study aims to assess the effect of Village Funds (VF), Village Fund Allocations (VFA), and Tax and Retribution Revenue Sharing (TRRS) on poverty. Fixed Effect Model panel data regression analysis was used on 488 observations from 61 districts on the island of Sumatra from 2016 to 2023, which were selected using purposive sampling with E-views software. The results show that VF, VFA, and TRRS have a significant negative effect on poverty, both partially and simultaneously, indicating that an increase in the three fiscal transfer instruments reduces poverty levels because villages with large transfer funds have greater flexibility for poverty alleviation programs.

Acknowledgment

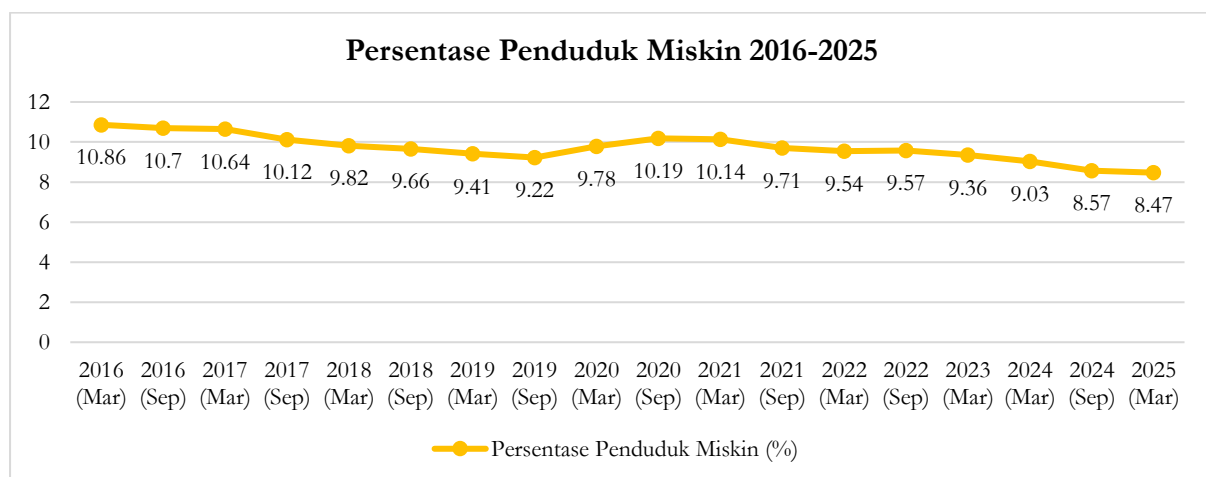
The limitations of this study include the use of regency-level data that does not capture inter-village variations and income-based poverty measurement. This study reinforces the theory of fiscal decentralization through the comprehensive integration of three fiscal transfer instruments and provides empirical evidence as a basis for formulating more effective poverty alleviation budget allocation policies.

Key word: Village Funds, Village Fund Allocations, Tax and Retribution Revenue Sharing, Poverty, Fiscal Decentralization

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problematika pembangunan kompleks yang menunjukkan tidak semata disebabkan oleh minimnya kapasitas fiskal melainkan juga terbatasnya layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya (Tran & Pham, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam, karena pertumbuhan ekonomi belum cukup menurunkan kemiskinan tanpa kebijakan yang efektif (Agussalim et al., 2024). Dengan mempertimbangkan bahwa kemiskinan dibentuk oleh berbagai elemen yang rumit dan saling terkait, maka pendekatan multidimensi diperlukan (Prawoto & Basuki, 2022).



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin, 2016-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Di Indonesia, tingkat kemiskinan menunjukkan ketimpangan regional yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (2025) mencatat tren penurunan persentase penduduk miskin dari

10,7% pada September 2016 menjadi 8,47% pada Maret 2025 (Gambar 1). Meskipun demikian, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 11,03%, hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan yang hanya 6,73% (Tabel 1). Kawasan pedesaan tetap menjadi kantong kemiskinan utama akibat tantangan dalam sektor pertanian dan tingginya pengangguran pedesaan (Fattah et al., 2025), serta keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar di pedesaan (Sari et al., 2025).

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, 2024-2025

Daerah/Tahun		Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan	Maret 2024	11,64	7,09
	September 2024	11,05	6,66
	Maret 2025	11,27	6,73
Pedesaan	Maret 2024	13,58	11,79
	September 2024	13,01	11,34
	Maret 2025	12,58	11,03
Total	Maret 2024	25,22	9,03
	September 2024	24,06	8,57
	Maret 2025	23,85	8,47

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Untuk mengatasi tantangan pengentasan kemiskinan pedesaan, pemerintah Indonesia telah menerapkan desentralisasi fiskal sejak pertengahan 2010-an untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengembangan daerah dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, transfer fiskal menjadi instrumen krusial untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, terutama di wilayah dengan pendapatan asli daerah yang rendah (Fadhila & Susilowati, 2025). Transfer fiskal menjadi salah satu instrumen dalam sistem desentralisasi fiskal. Di Indonesia. Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) merupakan tiga instrumen transfer fiskal utama yang diarahkan untuk pembangunan pedesaan.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2025

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)
Jawa	7,99
Sumatera	8,22
Bali dan Nusa Tenggara	11,93
Kalimantan	5,15
Sulawesi	8,96
Maluku dan Papua	18,90

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan tabel 2. Pulau Sumatera dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingkat kemiskinannya (8,22%) berada di posisi tengah secara nasional, tidak serendah Jawa dan Kalimantan, tetapi juga tidak setinggi wilayah timur Indonesia. Posisi tengah ini memungkinkan peneliti untuk melihat dampak kebijakan fiskal daerah secara lebih objektif, tanpa terpengaruh oleh kondisi yang terlalu ekstrem.

Untuk menganalisis hubungan antara transfer fiskal dan kemiskinan, penelitian ini menggunakan kerangka teori desentralisasi fiskal yang pertama kali dikembangkan secara komprehensif oleh Oates (1972) dalam karyanya yang menjadi pondasi literatur desentralisasi fiskal. Teori desentralisasi fiskal merujuk pada mekanisme pelimpahan wewenang dari tingkat pemerintahan pusat kepada tingkat pemerintahan daerah dalam mengelola pemasukan, pengeluaran, dan penyediaan layanan publik secara lebih mandiri.

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang melimpahkan otoritas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, perbedaan kemampuan fiskal antar daerah menyebabkan tidak semua daerah mampu membiayai kewenangan tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transfer fiskal (Rosita, 2017). Transfer fiskal merupakan dana transfer pusat ke daerah agar mampu menjalankan pemerintahannya sendiri dan agar pembangunan di seluruh daerah bisa berjalan merata (Arfah, 2021). Transfer fiskal menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam lingkup hingga tingkat desa, transfer fiskal diwujudkan melalui DD, ADD, dan BHPR yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Efektivitas desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat

dipengaruhi oleh kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, dimana desentralisasi cenderung gagal di wilayah dengan kualitas pengelolaan yang lemah, tingkat penyelewengan tinggi, serta sistem pemerintahan yang tidak demokratis (Digdowiseiso, 2022). Instrumen transfer fiskal yaitu DD, ADD, dan BHPR dirancang guna memperkuat kapasitas fiskal pada tingkat lokal dan meningkatkan penyediaan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DD merupakan dana yang berasal dari anggaran negara (APBN) yang didistribusikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian didistribusikan kepada desa dengan mekanisme transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten, dengan tujuan spesifik guna menunjang program pengembangan dan upaya peningkatan kapasitas warga di tingkat desa (Wahyudi & Khotimah, 2022). DD berfungsi sebagai instrumen dalam upaya menekan tingkat kemiskinan di suatu wilayah melalui peningkatan kondisi perekonomian pada tingkat desa. Sejalan dengan ketentuan Permendes PDTT (2019) yang menjelaskan bahwasannya salah satu fokus utama pemanfaatan DD ialah pengentasan kemiskinan, maka diperlukan kemampuan dalam mengintegrasikan serta memaksimalkan keseluruhan mekanisme distribusi dana yang disalurkan otoritas pusat ke wilayah desa. Penelitian ini selaras dengan temuan riset Abdullah (2022) bahwasannya DD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan berlawanan dilakukan Muliza (2022) menyimpulkan DD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

ADD sebagai bentuk pendanaan yang didistribusikan otoritas kabupaten/kota kepada wilayah desa dan bersumber dari komponen transfer fiskal antara pusat dan daerah sebagai penerimaan pemerintah kabupaten (Halulunga et al., 2024). ADD menjadi alokasi sumber dana yang vital bagi desa guna menunjang penyelenggaraan ragam program pada level desa. Orientasi utama ADD salah satunya ialah untuk pengurangan kemiskinan (Kholifah et al., 2018). Proporsi minimal senilai sepuluh persen (10%) bersumber pada transfer fiskal yang diperoleh tingkat Kabupaten/Kota di APBD (Yani, 2023). Penemuan ini bersesuaian dengan kajian studi Susilowati *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwasannya ADD memengaruhi kemiskin secara negatif dan signifikan. Sebaliknya, penemuan dari studi Lalira *et al.* (2018) menunjukkan ADD tidak memengaruhi kemiskinan.

BHPR merupakan dana transfer yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang berasal dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah 10 persen. Pengalokasian dana ini ditentukan berdasar-

kan Peraturan Bupati/Walikota, dengan prosedur pembagian sejumlah 60 persen dibagikan secara adil untuk seluruh desa dan 40 persen dibagikan dengan proporsi yang sesuai berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari setiap desa (Ariska et al., 2021). BHPR diberikan agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dalam lingkup kewenangan desa untuk pengembangan jasa dan penguatan penduduk (Putra et al., 2021). Dana ini berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Cahyono & Pratiwi, 2024). Penemuan ini bersesuaian dengan kajian studi Ricardo *et al.* (2023) menemukan bahwasannya PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi, temuan dari riset Kadafi & Murtala (2020) temuan tersebut menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian ini berpedoman pada studi Wulansari *et al.* (2024). Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini adalah memasukkan variabel independen tambahan yaitu BHPR untuk memperoleh pemahaman lebih lengkap tentang transfer fiskal dan kemiskinan. Penelitian ini memuat periode analisis dari 2022 menjadi 2016-2023 dan berfokus pada seluruh kabupaten di pulau sumatera, berbeda dengan fokus kajian terdahulu yang hanya diimplementasikan di kota Bogor.

Merujuk pada uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian, studi ini memiliki tujuan menganalisis pengaruh DD, ADD, dan BHPR terhadap kemiskinan pada 61 wilayah kabupaten Pulau Sumatera periode 2016-2023. Studi ini diharapkan mampu menghasilkan temuan nyata terkait keefektifan transfer fiskal dalam pengentasan kemiskinan pedesaan, terutama dalam dimensi dinamika perekonomian yang berbeda pada fase pra-pandemi, pandemi, dan pemulihan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metodologi kuantitatif berbasis data tidak langsung (sekunder) dengan tujuan menguji hipotesis menggunakan analisis statistik (Prawoto & Basuki, 2022). Data sekunder bersumber dari laporan resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mencakup informasi mengenai data variabel kemiskinan, DD, ADD, dan BHPR mencakup kurun waktu 2016-2023. Desain penelitian bersifat eksplanatif dengan pendekatan kausal-komparatif disebabkan seluruh variabel merupakan data historis yang sulit dimanipulasi. Populasi penelitian terdiri dari 105 kabupaten di Pulau Sumatera. Teknik sampling yang diterapkan adalah *purposive sampling*. Sejumlah 61 kabupaten dipilih sebagai sampel, sehing-

ga diperoleh 488 sampel data. Kriteria yang digunakan meliputi kabupaten yang berlokasi di Pulau Sumatera, ketersediaan data lengkap untuk semua variabel mencakup periode 2016-2023, serta tidak mengalami pemekaran wilayah atau perubahan administratif selama periode penelitian.

Kemiskinan pada studi ini diukur melalui persentase penduduk miskin (P0) yang mencerminkan indikator proporsi perbandingan populasi yang memiliki rata-rata belanja per kapita bulanan berada di bawah standar garis kemiskinan nasional. Indikator ini umum digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan efektivitas kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia (Amaliah et al., 2020).

Dalam studi ini, DD diperhitungkan sebagai total DD (rupiah) yang didistribusikan tiap-tiap kabupaten /kota selama periode penelitian, sebagaimana penelitian Halulanga *et al.* (2024) yang menggunakan data DD dari kabupaten. Pengukuran ADD dalam penelitian ini dilakukan menggunakan total ADD (dalam rupiah). Penerapan indikator ini sesuai dengan studi Wulansari *et al.* (2024) yang mengkaji pengaruh ADD terhadap kemiskinan daerah. Pada kajian ini, variabel BHPR diukur memakai total realisasi penerimaan BHPR (rupiah) yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota sepanjang periode penelitian selaras dengan penelitian Saputri & Rahayu (2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, seleksi model, regresi panel data, pengujian asumsi klasik, serta tes hipotesis. Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Pengujian hipotesis meliputi pengujian parsial, simultan, dan koefisien determinasi. Aplikasi E-views versi 12 digunakan sebagai alat pengolah data. Pengujian dilakukan untuk menentukan kelayakan model regresi yang dihasilkan dalam menarik kesimpulan atau untuk mengidentifikasi kekuatan korelasi antar variabel. Formulasi model regresi data panel yaitu:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Deskripsi Persamaan:

- Y = Kemiskinan
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi
- X_1 = DD
- X_2 = ADD
- X_3 = BHPR

e = Error

HASIL

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Dev	Minimum	Maximum
Kemiskinan	488	10,83	4,85	2,46	30,92
DD	488	149.108.583.799	1,16	6.134.372.160	1.133.868.562.895
ADD	488	77.857.728.345	4,05	5.301.817.000	318.740.460.000
BHPR	488	3.743.939.348	3,26	12.433.142	21.487.281.261

Sumber: Data olah, 2025

Variabel kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 10,83 persen. Nilai minimum tingkat kemiskinan sebesar 2,46 persen terdapat di Kabupaten Bangka Barat, yang menunjukkan bahwa hanya 2,46 persen penduduk di wilayah tersebut memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan setempat sebesar Rp635.861. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka Barat telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Sebaliknya, nilai maksimum tingkat kemiskinan sebesar 30,92 persen tercatat di Kabupaten Nias Utara, yang berarti hampir sepertiga penduduk di daerah tersebut masih memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan setempat sebesar Rp370.371. Perbedaan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Nias Utara mencapai 28,46 poin persentase, yang mencerminkan adanya ketimpangan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar antar kabupaten di Pulau Sumatera. Nilai standar deviasi 4,85 menandakan adanya perbedaan tingkat kemiskinan antar daerah, namun variasinya tidak terlalu besar. Variabel DD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp149.108.583.799. Nilai minimum sebesar Rp6.134.372.160 dan nilai maksimum mencapai Rp1.133.868.562.895 mencerminkan ketimpangan DD yang sangat tinggi serta mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas fiskal dan karakteristik wilayah penerima DD. Variabel ADD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp77.857.728.345. Nilai minimum sebesar Rp5.301.817.000 dan nilai maksimum sebesar Rp318.740.460.000 menunjukkan bahwa ADD bervariasi cukup besar antar daerah. Variasi ini mengindikasikan bahwa ADD tidak terdistribusi secara merata, melainkan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan masing-masing daerah. Variabel BHPR memiliki nilai rata-rata sebesar Rp3.743.939.348, dengan nilai minimum sebesar Rp12.433.142 dan nilai maksimum sebesar Rp21.487.281.261. Rentang nilai yang cukup lebar ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan dan membagikan

pajak serta retribusi kepada desa sangat bervariasi. Hal ini mencerminkan perbedaan potensi ekonomi dan kapasitas fiskal antar wilayah.

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	185.726884	(60,424)	0.0000
Cross-section Chi-square	1613.440747	60	0.0000

Sumber: Data olah, 2025

Penetapan model dilaksanakan untuk mengidentifikasi model regresi optimal, dengan tahap pertama mengaplikasikan uji Chow. Jika nilai probabilitas memperlihatkan angka menghasilkan nilai probabilitas melebihi ambang batas 0,05 ($> 0,05$), yang menandakan model tersebut merupakan model yang optimal yaitu *Common Effect Model* (CEM), berbanding terbalik jika p-value tidak melebihi ambang batas 0,05 ($< 0,05$) sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi model yang sesuai. Merujuk pada output pengujian Chow, p-value tercatat sejumlah 0,0000, menandakan ($< 0,05$), sehingga model terpilih ialah *Fixed Effect Model*.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	63.340988	3	0.0000

Sumber: Data olah, 2025

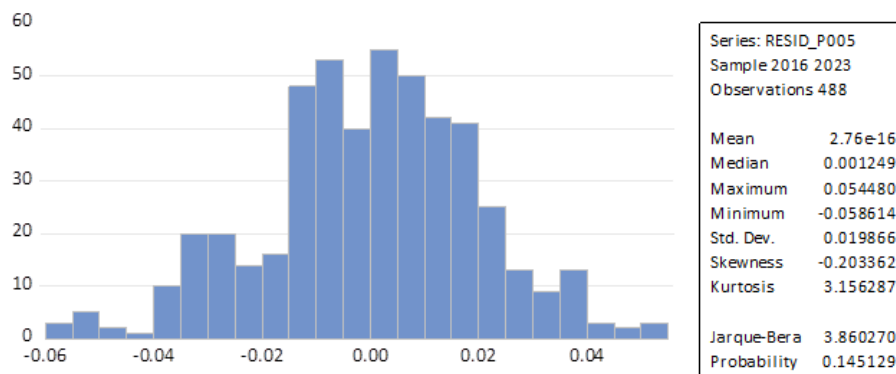
Langkah selanjutnya dalam pemilihan model adalah mengimplementasikan uji Hausman guna mengidentifikasi model regresi terbaik. Jika nilai probabilitas memperlihatkan angka menghasilkan nilai probabilitas melebihi ambang batas 0,05 ($> 0,05$), yang menandakan model tersebut merupakan model yang optimal yaitu *Random Effect Model* (REM), berbanding terbalik jika p-value tidak melebihi ambang batas 0,05 ($< 0,05$) sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi model yang sesuai. Merujuk pada output pengujian Hausman, p-value menunjukkan angka 0,0000 menandakan ($< 0,05$), pada akhirnya FEM digunakan sebagai model akhir.

Kesamaan *output* dari kedua pengujian Chow maupun Hausman yang menunjukkan FEM sebagai pendekatan yang sesuai membuat uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak lagi diperlukan. Pengujian LM hanya diperlukan untuk komparasi antara CEM dan REM ketika

hasil uji Chow dan Hausman belum mengidentifikasi model regresi terbaik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pengujian yang mendukung FEM sebagai metode estimasi untuk regresi data panel berdasarkan hasil dari kedua pengujian ini. Oleh karena itu, metode FEM digunakan pada studi ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data olah, 2025

Berdasarkan Gambar 2 yang memuat uji normalitas, nilai statistik Jarque-Bera menunjukkan angka 3,860270 serta p-value 0,145129. Disebabkan p-value mencapai nilai lebih banyak dari ($>0,05$), menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual pada model regresi terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	DD	ADD	BHPR
DD	1	0,4731	0,2616
ADD	0,4731	1	0,5824
BHPR	0,2616	0,5824	1

Sumber: Data olah, 2025

Merujuk pada matriks korelasi, temuan menunjukkan bahwa seluruh koefisien korelasi antar variabel bebas tidak melampaui batas toleransi 0,80, mengindikasikan model penelitian yang digunakan lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.012225	0.005293	2.309465	0.0213
DD	-0.000667	0.001046	-0.637689	0.5240
ADD	-0.002534	0.002001	-1.266243	0.2060
BHPR	0.000593	0.001062	0.558298	0.5769

Sumber: Data olah, 2025

Dari tabel hasil pengujian heteroskedastisitas, terlihat bahwasannya nilai p-value setiap variabel independen melebihi 0,05 ($> 0,05$), yang mengindikasikan penelitian ini memenuhi syarat pengujian.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model	DW Statistic	Kriteria
Regresi Panel	2,369220	$1,5 < DW < 2,5$

Sumber: Data olah, 2025

Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik *Durbin-Watson* senilai 2,369220 yang berada dalam rentang nilai yang dapat diterima (mendekati 2 dan berada pada rentang 1,5 hingga 2,5). Berdasarkan hasil tersebut, model dinyatakan tidak mengindikasikan adanya kendala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	Adjusted R-squared	F-statistic	Prob (F-statistic)
0.978109	0.974856	300.7073	0.000000

Sumber: Data olah, 2025

Berdasarkan nilai Adjusted R-Square 0.97485 dapat dinyatakan bahwasannya variabel DD, ADD, dan BHPR secara keseluruhan berkontribusi sejumlah 97.49% terhadap kemiskinan. Sedangkan proporsi 2.51% dipengaruhi oleh variabel-variabel eksternal dimana tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	Prob (F-statistic)	Tingkat Sig. (α)
300.7073	0.000000	0.05

Sumber: Data olah, 2025

Pada tabel Output uji simultan (uji F) memperlihatkan bahwasannya nilai F-statistic senilai 300,7073 dan probabilitas 0,000000. P-value yang memiliki nilai signifikansi di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwasannya variabel DD, ADD, BHPR secara simultan memengaruhi kemiskinan secara signifikan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 11. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Ket.
C	1.317949	0.020263	65.04175	0.0000	Signifikan
DD	-0.021611	0.004741	-4.558448	0.0000	Signifikan
ADD	-0.027056	0.005271	-5.132627	0.0000	Signifikan
BHPR	-0.008519	0.002472	-3.445985	0.0006	Signifikan

Sumber: Data olah, 2025

Pengujian statistik t (parsial) memiliki kriteria pengukuran, yakni ketika t hitung melampaui t tabel dengan probabilitas di bawah 0,05, hal ini menunjukkan adanya pengaruh bermakna dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika t hitung berada di bawah t tabel disertai nilai probabilitas melebihi 0,05, maka variabel bebas dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hasil menunjukkan secara ringkas nilai t-hitung variabel DD sejumlah -4,558448 yang melampaui t-tabel 1,97897, dengan signifikansi 0,0000 lebih rendah daripada 0,05 yang mengindikasikan bahwasannya DD berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Nilai t-hitung variabel ADD sejumlah -5,132627 yang melampaui t-tabel 1,97897, dengan signifikansi 0,0000 lebih rendah daripada 0,05 yang mengindikasikan bahwasannya ADD berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Nilai t-hitung variabel BHPR mencapai -3,445985, melampaui t-tabel 1,97897, dengan signifikansi 0,0006 kurang daripada 0,05 mengindikasikan bahwasannya BHPR berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan.

Uji Regresi Data Panel

$$Y_{it} = 1.3179 - 0.0216X_1 - 0.0271X_2 - 0.0085X_3$$

Dalam persamaan regresi yang diperoleh, nilai konstanta sejumlah 1,3179. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan akan mempunyai nilai 1,3179 jika semua variabel bebas bernilai nol atau tidak ada kontribusi dari ketiga variabel tersebut. Nilai koefisien untuk DD (X_1) bernilai negatif sejumlah -0,0216 yang mengindikasikan bahwasannya setiap peningkatan 1 satuan pada DD akan mengakibatkan penurunan Kemiskinan sejumlah 0,0216 satuan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasannya peningkatan DD berkontribusi dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah yang menjadi objek studi. Nilai koefisien untuk ADD (X_2) bernilai negatif sejumlah -0,0271 yang mengindikasikan bahwasannya setiap peningkatan 1 satuan pada ADD akan menyebabkan penurunan Kemiskinan sejumlah 0,0271 satuan. Koefisien ini memiliki pengaruh terbesar dibandingkan variabel lainnya, mengindikasikan bahwa ADD merupakan faktor yang paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Nilai koefisien BHPR (X_3) bernilai negatif sejumlah -0,0085 mengindikasikan bahwasannya setiap kenaikan 1 satuan pada BHPR akan mengakibatkan penurunan Kemiskinan sejumlah 0,0085 satuan. Meskipun memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan DD dan ADD, BHPR tetap memberikan kontribusi positif dalam upaya pengurangan kemiskinan di wilayah penelitian. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen memiliki hubungan negatif dengan Kemiskinan, yang sesuai dengan ekspektasi teoritis bahwa peningkatan sumber pendanaan daerah berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. ADD menunjukkan pengaruh terbesar, diikuti oleh DD dan BHPR.

Pengaruh DD, ADD, dan BHPR terhadap Kemiskinan

Melalui teori desentralisasi fiskal bahwa dana dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dibagikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik serta berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Cahyono & Pratiwi, 2024). Ketiga komponen dana ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena menciptakan sinergi dalam pembiayaan pembangunan desa, mulai dari penyediaan sarana prasarana fisik hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sari & Abdullah, 2017). Menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal melalui mekanisme dana perimbangan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk

merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Susilowati et al., 2017). Ketersediaan BHPR, ADD, dan DD secara bersamaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kabupaten/kota.

Pengaruh DD terhadap Kemiskinan

Merujuk pada temuan penelitian, DD memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten di Pulau Sumatera. Hasil tersebut memperlihatkan bahwasannya DD menyebabkan penurunan kemiskinan sehingga mengindikasikan bahwasannya kian banyak DD yang diterima, kian rendah kemiskinan. Secara teoretis, korelasi negatif ini dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal yang dikembangkan oleh Oates (1999), di mana penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dapat mendistribusikan sumber daya secara lebih optimal dan akurat sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah. DD sebagai instrumen desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan kemiskinan secara langsung melalui program-program pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas produktif masyarakat miskin (Jumaiyah & Wahidullah, 2019; Wahyudi & Khotimah, 2022). Ketika DD dikelola dengan baik, maka akan memperbaiki aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pokok, sekaligus menghasilkan peluang pekerjaan, serta menstimulasi perkembangan ekonomi wilayah yang berujung pada penurunan angka kemiskinan (Sihombing et al., 2022). Hasil studi searah dengan studi Yacoub (2022), Sihombing *et al.* (2022), Normasyhuri *et al.* (2022), serta Rachman *et al.* (2023) yang mengindikasikan bahwasannya DD memiliki pengaruh secara negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh ADD terhadap Kemiskinan

Merujuk pada temuan penelitian, ADD memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten di Pulau Sumatera. Output ini memperlihatkan bahwasannya ADD menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan secara nyata. Studi ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi ADD yang dialokasikan, semakin rendah tingkat kemiskinan. Secara teoretis, hubungan negatif ini dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal yang dikembangkan oleh Oates (1999), di mana penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dapat mendistribusikan sumber daya secara lebih optimal dan akurat sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah. ADD sebagai instrumen desentralisasi fiskal mem-

berikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan kemiskinan secara langsung melalui program-program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas produktif masyarakat miskin (Azzahra et al., 2022). Ketika ADD dikelola dengan baik, maka akan memperbaiki aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pokok, sekaligus menghasilkan peluang pekerjaan, serta menstimulasi perkembangan ekonomi wilayah yang berujung pada penurunan angka kemiskinan (Wulansari et al., 2024). Hasil studi ini searah dengan studi Azzahra *et al.* (2022), Wulansari *et al.* (2024), serta Novrianti *et al.* (2022) yang memperlihatkan bahwasannya ADD memiliki pengaruh secara negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh BHPR terhadap Kemiskinan

Merujuk pada temuan kajian, BHPR memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten di Pulau Sumatera. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak BHPR yang didistribusikan, kian sedikit kemiskinan. Secara teoretis, korelasi negatif ini dapat dijelaskan melalui Teori Desentralisasi Fiskal yang dikembangkan oleh Oates (1999), yang memfokuskan perhatian pada pentingnya mekanisme BHPR terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. BHPR sebagai komponen dari dana transfer yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai prioritas lokal (Saputri & Rahayu, 2023). Ketika BHPR meningkat, kapasitas fiskal daerah untuk membiayai infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi juga meningkat, yang semuanya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan Ricardo *et al.* (2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean *et al.* (2022), Marbun & Muchtolifah, (2023), Ricardo *et al.* (2023), yang menyatakan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

SIMPULAN

Temuan studi menunjukkan jika DD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwasannya kenaikan besaran DD yang dialokasikan mengakibatkan penurunan pada kemiskinan di daerah tersebut. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa DD sebagai instrumen desentralisasi fiskal berhasil mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan. Demikian pula, ADD berpe-

ngaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa kenaikan besaran ADD dapat memperkuat kapabilitas finansial pemerintahan desa dalam mengimplementasikan fungsi pelayanan terhadap penduduk serta program pengembangan yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Sementara itu, BHPR juga berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa mekanisme BHPR dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan bahwa ketiga variabel transfer fiskal tersebut memainkan peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2022). Pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo. *Jambura Economic Education Journal*, 4(2), 165–176. <https://doi.org/10.37479/jeej.v4i2.14165>
- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The path to poverty reduction: How do economic growth and fiscal policy influence poverty through inequality in Indonesia? *Economies*, 12(12), 316. <https://doi.org/10.3390/economies12120316>
- Amaliah, E. N., Darnah, & Sifriyani. (2020). Regresi data panel dengan pendekatan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM)(Studi kasus: persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2015-2018). *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106–115. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574>
- Arfah, N. (2021). *Pengaruh transfer fiskal dan dana desa terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia (Doctoral dissertation)*. Universitas Hasanuddin.
- Ariska, F. Y., Amin, M., & Junaidi. (2021). Pengaruh pendapatan asli desa (PADesa), dana desa (DD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) terhadap belanja desa bidang pendidikan (studi empiris pada desa se-Kabupaten Malang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04), 91–105.
- Azzahra, S., Riani, W., & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh alokasi dana desa (ADD) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.215>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*.
- Cahyono, Y. T., & Pratiwi, R. (2024). Effect of village revenue, village fund, and revenue sharing levy tax on village health expenditure. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5652–5660.
- Digdowiseiso, K. (2022). Is fiscal decentralization growth enhancing? A cross-country study 3278

- in developing countries over the period 1990–2014. *Economies*, 10(3), 62. <https://doi.org/10.3390/economies10030062>
- Fadhila, L. S., & Susilowati, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah: Studi kasus pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018–2021. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 1428–1448. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4607>
- Fattah, S., Razak, A. R., Yusuf, M. A., & Fernandes, A. A. R. (2025). Econometric modelling of rural poverty, unemployment, and the agricultural sector using a truncated spline approach with longitudinal data. *Economies*, 13(9), 273. <https://doi.org/10.3390/economies13090273>
- Halulanga, F., Bachmid, G., & Ernawati. (2024). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(11), 5234–5247. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i11.5371>
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2019). Pembenahan Pengelolaan Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Desa Sengonbugel. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(1), 19–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3307>
- Kadafi, M., & Murtala. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23–31.
- Kholifah, I., Widiyanto, A., & Sulistyowati, D. (2018). *Analisis kontribusi dana desa dalam mengurangi angka kemiskinan pada Kantor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal*.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 62–72.
- Marbun, K. N. S., & Muchtolifah. (2023). Pengaruh tenaga kerja dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 320–327. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p320-327>
- Muliza. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, VI(1), 1–11.
- Normasyhuri, K., Suryanto, T., & Prayoga, R. (2022). Dampak dana desa terhadap kemiskinan dengan pendekatan indikator sustainable development goals (SDGs): Tinjauan ekonomi Islam. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, 18(2), 173–185.
- Novrianti, Tampubolon, D., & Mardiana. (2022). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 2(2), 131–140.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*,

XXXVII(September), 1120–1149.

- Panggabean, H. L., Hariani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening tahun 2015-2019. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2200–2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, R. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Permendes PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019)*.
- Prawoto, N., & Basuki, A. T. (2022). Factors affecting poverty in Indonesia: A panel data approach. *Quality - Access to Success*, 23(186), 156–161. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.186.20>
- Putra, A. A. I., Nurwahida, Karunia, K. A., Nazzaruddin, & Arman, N. I. (2021). Implementasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 (Studi di Kabupaten Sinjai). *Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 1–10. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Rachman, A., Kornita, S. E., & Tampubolan, D. (2023). Pengaruh dana desa, pertumbuhan ekonomi, dan belanja langsung terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016–2020. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 408–421. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.870>
- Ricardo, R., Muchlisah, A., & Feriansyah. (2023). Pengaruh keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(4), 1338–1343. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.687>
- Rosita, L. (2017). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat dan implikasinya terhadap disparitas pendapatan (studi kasus pada 33 pemerintah provinsi di Indonesia). *JRAMI-Jurnal Riset Akuntansi & Manajemen Indonesia*, 11(1), 28–37.
- Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa: Studi kasus pada desa di Kecamatan Bawang tahun 2018–2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 53–62.
- Sari, & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34–49.
- Sari, J. A., Sunarya, A., & Darmanto. (2025). The role of the village fund program in alleviating poverty in rural areas. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 52(3), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.35516/hum.v52i3.7096>
- Sihombing, P. R., Muslianti, D., & Yunita. (2022). Apakah dana desa dan fungsi belanja APBD mampu mengatasi kemiskinan di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), 236–243. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.12>
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526.



- Tran, V. H., & Pham, Q. T. (2024). Growth and poverty reduction in Vietnam: A strategic policy modelling study. *National Accounting Review*, 6(3), 449–464. <https://doi.org/10.3934/NAR.2024020>
- Wahyudi, H., & Khotimah, S. N. (2022). Pengaruh dana desa dan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (SEKP)*, 1(1), 45–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1423>
- Wulansari, A. T., Amyulianthy, R., & Herlan. (2024). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 4(1), 16–26.
- Yacoub, Y. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengangguran Perdesaan Dan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 5, 137–153.
- Yani, S. L. (2023). Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 79–88. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i3.670>